

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa perempuan sebagai komponen warga Negara dan sumber daya manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk berperan di segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik. Berbagai peraturan juga telah disusun dan diratifikasi untuk penguatan partisipasi perempuan dalam bidang kehidupan bernegara dan berpolitik. Hak perempuan dalam politik mendapatkan salurannya melalui UU No 12 tahun 2003 tentang partai politik, tepatnya dalam pasal 65 ayat 1. Undang-undang tersebut mengharuskan partai politik untuk mencalonkan 30 persen perempuan dalam Pemilu. Kebijakan *affirmative action* 30 persen bagi perempuan dalam politik sudah dilaksanakan dua kali. Meski demikian, keterwakilan perempuan di lembaga DPR masih belum memenuhi harapan. Data Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa jumlah perempuan yang duduk di DPR hanya 18 persen, sedangkan di MPR dan DPD masing-masing 20 dan 27 persen. Di DPRD provinsi hanya 16 persen, sedangkan DPRD kota dan Kabupaten hanya 12 persen.

Banyak faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan di lembaga politik masih rendah¹. Diantara faktor tersebut adalah budaya. Secara budaya, perempuan dalam sistem patriarki hanya diberi peran di sektor domestik, sementara sektor publik, seperti politik seolah-olah hanya menjadi domain kaum laki-laki. Hal ini membuat peluang dan kesempatan perempuan dalam bidang politik makin kecil dan sulit. Hambatan lain adalah persoalan sumber daya manusia yang mencakup kualitas maupun kuantitas. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut merupakan efek dari budaya yang selama ini sangat streatipe dan bias gender.²

¹ Lihat, www.koalisiperempuan.or.id, Jumat, 20 Agustus 2014.

²Lihat alasan-alasan untuk mendomestikasi perempuan, mulai dari alasan sosial-budaya yang mendesak perempuan sampai ideologis dan teologis, dalam: Irwan Abdullah, ed, 2006, *Sangkan Paran Gender*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, h.6-28.

Jika merujuk kepada ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), maka peran perempuan Indonesia dalam berbagai hal, termasuk dalam politik, masih tergolong rendah, bahkan dapat dianggap tertinggal. Menurut data dari hasil Pemilu 2009-2014, keterwakilan perempuan secara nasional hanya 101 anggota (18,3 persen) dari 560 anggota DPR. Perwakilan DPD hanya 27 persen, sementara DPRD di 33 Provinsi hanya 16 persen dan DPRD kabupaten/ kota hanya 12 persen. Terdapat 10 persen dari 497 kabupaten/ kota yang tidak ada keterwakilan perempuan di legislatif. Adapun keterlibatan perempuan dalam pimpinan eksekutif hanya terdapat seorang menjadi gubernur dan seorang menjadi wakil gubernur dari 33 gubernur/ kepala daerah. Perempuan yang menjadi bupati/ walikota sebanyak 38 orang (7,6 persen) dari 497 kabupaten/ kota. Perempuan yang menjadi menteri/ wakil menteri baru mencapai 11 persen dari 56 menteri/ wakil menteri atau setingkat menteri. Data ini membuktikan, bahwa persentase laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga banyak ditemukan kesenjangan gender yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan.³

Demikian pula untuk wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2014, perempuan yang berhasil meraih kursi parlemen di tingkat kabupaten dan kota masih jauh dari harapan sebagaimana tabel berikut ini:⁴

Tabel Caleg Perempuan Terpilih Kab./ Kota di Kalsel Pemilu thn 2004, 2009 dan 2014

No.	Nama Kabupaten / Kota	Thn 2004		Thn 2009		Thn 2014	
		P	%	P	%	P	%
1	Banjarmasin	4	9,00	12	26,67	8	17,70
2	Banjar	5	12,82	7	17,95	10	22,0
3	Banjarbaru	0	0,00	3	12,00	6	20,00
4	Tapin	2	8,00	4	16,00	4	16,00
5	Hulu Sungai Selatan	0	0,00	3	9,38	4	13,33

³Lihat data tersebut dalam: nasional.sindonews.com/read/2013/06/14/12/749796/partisipasi-perempuan-dalam-politik-masih-rendah, 9 Juni 2014.

⁴Data tersebut diperoleh dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, Dra.Hj. Masyitah Umar, M.Hum, berupa himpunan laporan KPU Kabupaten/ Kota se-Kalsel, Rabu, 20/8/2014.

6	Hulu Sungai Tengah	3	10,00	6	20,00	7	23,33
7	Hulu Sungai Utara	3	10,00	2	6,67	5	16,67
8	Tabalong	3	12,00	6	20,00	7	23,33
9	Balangan	2	10,00	2	8,00	3	12,00
10	Tanah Bumbu	0	0,00	1	2,87	2	5,70
11	Tanah Laut	2	6,60	4	2,00	7	20,00
12	Kotabaru	5	16,70	6	24,00	6	17,14
13	Barito Kuala	3	10,00	3	10,00	4	13,33

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa walaupun ada kenaikan persentasi jumlah keterpilihan perempuan dari 2004 sampai dengan 2014 yakni rata-rata 8,09% pada pemilu 2004, 12,12% pada Pemilu 2009 dan 16,96% pada pemilu 2014, namun angka kenaikan ini tidak terlalu signifikan. Perolehan persentasi caleg perempuan tertinggi ada di Kabupaten Tabalong, sedangkan wilayah yang hanya memperoleh 2 kursi dari 35 kursi atau berada pada angka 5,7 persen adalah kabupaten Tanah Bumbu. Angka-angka tersebut masih jauh dari harapan. Apa yang disebut dengan kuota 30 persen calon perempuan hanya sebagai formalitas pemenuhan syarat mengikuti PEMILU saja. Semua ternyata akan kembali kepada perempuan itu sendiri yang maju menjadi caleg, apakah mereka bisa eksis dan mampu merebut simpati masyarakat agar memilih caleg perempuan.

Hal tersebut menjadi persoalan nyata bahwa elektabilitas (keterpilihan) perempuan masih rendah dibanding laki-laki. Berdasarkan analisis Puskapol Fisip UI (2014) baru lalu menunjukkan bahwa total suara yang diberikan pada caleg, rata-rata perolehan suara caleg perempuan hanya 22,45% dibanding laki-laki sebesar 77,54%. Kemudian presentasi keterpilihan perempuan di DPR pada Pemilu 2014 menurun (hanya 97 orang /17,3%) dibandingkan pemilu 2009 (104 orang/18,4%).

Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya angka-angka tersebut. Diantara faktor tersebut selain faktor sosial-budaya, juga psikologi, sumber daya manusia dan yang tidak kalah penting adalah hambatan dana⁵. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan

⁵ Ernanti Wahyurini dkk, *Buku Panduan Kesadaran Bernegara*, Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Unit Perencanaan, 2007 h. 76-77.

oleh Elder yang menyatakan, bahwa “*The primary reason for women’s under representative is that women are significantly less likely to choose to run than men. A multiplicity of factors including political gender role socialization, lack of political confidence, family responsibility and relatively few numbers of visible women role models in politics.*”⁶

Persaingan bagi para caleg sangat ketat karena tidak hanya terjadi antar-partai namun juga dalam satu partai sendiri, terutama dengan caleg-caleg ternama. Terlebih bagi caleg perempuan yang memang dari awal sudah diberi label dengan stereotip yang seakan tidak cocok berkiprah dalam dunia politik karena diidentikkan dengan dunia laki-laki. Berkaitan dengan hal ini, Rosaldo mengatakan: “*Both natives and ethnographies tend to view politics as male pastime...women are seldom as political actors but rather as pawn to used in the political maneuvers of men*”⁷. Biasanya, dunia politik dilabelkan dengan dunia yang kejam dan brutal tanpa mengenal kawan.

Berdasarkan perjalanan perempuan di politik selama ini, persaingan yang dihadapi para caleg perempuan berlapis-lapis. Apalagi jika perempuan tersebut baru pertama kali terlibat dalam pencalonan, persaingan akan dirasakan semakin berat. Seorang calon perempuan selain harus bersaing dengan sesama perempuan yang mungkin sudah merupakan wajah lama (baik satu partai maupun beda partai), juga harus bersaing dengan caleg laki-laki yang merupakan pemain lama, ternama dan sudah “mapan” dalam berpolitik. Persaingan lapis selanjutnya adalah persaingan uang yang akhir-akhir ini diidentikkan dengan politik. Iklim perpolitikan dalam beberapa periode ini, rentan dengan politik uang (*money politik*). Lebih menarik lagi, hal tersebut dianggap wajar karena dianggap sebagai salah satu strategi penting yang menentukan kemenangan. Padahal, strategi yang sebenarnya adalah upaya untuk peningkatan kualitas diri, komunikasi yang intensif dengan konstituen, pengelolaan tim sukses, pendanaan yang rasional dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat dipastikan, hanya caleg perempuan dengan strategi terbaik yang akan mampu bersaing dan mendapatkan kursi di parlemen yang diperebutkan

⁶ Elder Laurer, *Why Women don’t run, Explaining Women’s Under representation in America Political Institution*, pp. 27.

⁷ Michele Zimbalist Rosaldo, *Women, Culture and Society*, Stanford University Press.

tersebut. Perempuan-perempuan yang sukses di politik adalah perempuan yang penuh dedikasi. Mereka menjadikan politik sebagai jalan, pilihan hidup dan sarana pembuktian eksistensi diri, bahwa mereka mampu melewati hal-hal sulit dan berat yang terdapat di bidang politik. Mereka telah membuktikan, bahwa mereka memiliki kemampuan dalam berpolitik sebagaimana laki-laki.⁸

Keberhasilan caleg perempuan tidak lepas dari totalitas yang ditunjukkan mereka. Salah satu wujud totalitas mereka tersebut adalah telah berhasil menyusun “strategi” yang menjadikan mereka sebagai pemenang dalam meraih kursi menuju parlemen. Strategi menjadi penentu bagi kesuksesan calon legislatif perempuan. Bertolak dari pentingnya sebuah strategi, maka dianggap perlu untuk mengkaji secara khusus dalam bentuk penelitian yang berjudul “Strategi Caleg Perempuan Terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan Pemilu 2014”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana strategi caleg perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Kota dan Kabupaten di Kalimantan Selatan dalam PEMILU 2014 yang meliputi strategi pemasaran politik dan strategi modal sosial.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dijalankan oleh caleg perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten/ Kota Kalimantan Selatan dalam pemilu 2014 yang mencakup pemasaran politik dan modal sosial.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, akan menghasilkan rumusan strategi politik teoritis, ilmiah dan komprehensif yang memperkaya khazanah intelektual di bidang kajian gender dan politik.
2. Secara praktis, akan menjadi rujukan bagi pengembangan strategi politik perempuan yang tepat sesuai keadaan dan tuntutan zaman.
3. Memotivasi perempuan agar lebih pro-aktif memasuki lembaga legislatif.
4. Mendorong pihak-pihak terkait dalam upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik.

⁸ Yanti Mucktar, 2000, *Gerakan Perempuan Indonesia*, Edisi 14, Jurnal Perempuan, Jakarta, h.11-13.

D. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pemenangan partai tertentu ataupun caleg tertentu sudah banyak dilakukan. Penelitian yang dilaksanakan peneliti dalam beberapa hal akan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan.

Pertama, penelitian oleh Danur Widyo Arikusuma, UNS 2011 dengan judul *Strategi Komunikasi Partai Politik dalam Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Ir H. Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo Dalam Pemilukada Kota Surakarta 2010*. Penelitian ini menggambarkan komunikasi yang cukup intense antara aktor politik dan konstituennya, baik melalui media massa maupun dalam kegiatan terjun langsung. Walaupun aktifitas komunikasi caleg perempuan dengan partai juga termasuk hal diamati dalam penelitian ini, namun bukan menjadi fokus satu-satunya.

Kedua, penelitian tentang *Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif pada Pemili Legislatif (Studi pada Caleg Perempuan Terpilih pada DPRD Kota Medan)* yang ditulis oleh Kartika Panjaitan, mahasiswa pasca sarjana Sosiologi Universitas Gajah Mada tahun 2009. Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan, bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam keterpilihan anggota legislatif perempuan adalah penggunaan praktek kampanye dari pintu ke pintu (*door to door*), kampanye diskusi kelompok (*Group Discussion Campaign*), Kampanye Massa Tidak Langsung (*Indirect Massa Campaign*) serta kampanye massa langsung (*Direct Massa Campaign*). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan kami lakukan adalah penelitian tersebut berkonsentrasi membahas strategi kampanye sebagai kunci untuk pemenangan para caleg perempuan.

Ketiga, penelitian berjudul *Hambatan Calon Legislatif Perempuan dalam Partai dan sistem Politik Menuju Lembaga Legislatif: Studi kasus: Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu 2004*, ditulis oleh Shelly Adelina. Penelitian ini menganalisis faktor kegagalan caleg. Penelitian ini menemukan, bahwa parpol ternyata tidak berperan efektif dan malah agak menghambat jalannya para caleg menuju lembaga legislatif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Seli Naswati dengan judul *Perbandingan Strategi Caleg Perempuan dalam Memenangkan Kursi di Parlemen (Studi kasus 4 Adeg perempuan 2004)*. Penelitian ini lebih banyak membandingkan keunggulan caleg *incumbent* dan pemula dalam mengelola modal sosial dan melakukan pemetaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat kualitatif, sedangkan pendekatan penelitian dilakukan melalui studi deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di propinsi Kalimantan Selatan dengan mengambil sampel di 7 (tujuh) wilayah yang perolehan suaranya beragam. Ada yang mengalami peningkatan, ada pula yang menurun. Ketujuh wilayah tersebut mencakup:

- a. Kota Banjarmasin
- b. Kabupaten Banjar
- c. Kota Banjarbaru
- d. Kabupaten Tanah Laut
- e. Kabupaten Kota Baru
- f. Kabupaten Tapin
- g. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah perwakilan caleg perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan sesuai sampel yang telah ditentukan. Setiap Kabupaten/ Kota diambil 1 (satu) sampai 3 (tiga) sampel dari partai yang berbeda. Perbedaan jumlah sampel disesuaikan dengan keadaan caleg di Kabupaten/ Kota.

Objek penelitian adalah strategi yang dilaksanakan oleh para caleg perempuan dalam upaya keterpilihan mereka sebagai anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan.

4. Data dan Sumber data

Data yang digali dari penelitian ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan strategi caleg perempuan terpilih sehingga berhasil memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Strategi tersebut mencakup marketing politik dan modal sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi 2 (dua), yaitu:

- a. Data Primer: para caleg perempuan terpilih sesuai sampel.
- b. Data Sekunder: tokoh masyarakat, lembaga terkait, LSM dan dokumen-dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Wawancara dengan para caleg perempuan yang berhasil masuk sebagai anggota legislatif di Kabupaten/ Kota di 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota Kalimantan Selatan.
- b. Mencermati dokumen yang berkaitan dengan strategi caleg terpilih.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.